



Babak Ketiga Sejarah Microsoft di Indonesia

Saya beri judul di atas, karena saat ini kita sedang berada di babak ketiga dari sejarah Microsoft di Indonesia. Babak pertama adalah saat Microsoft membiarkan semua *software*-nya dibajak, lalu babak kedua adalah pada saat Microsoft melalui BSA mulai mengebrak pasar dengan UU HaKI, dan babak ketiga yaitu pada saat *third party* mulai berpesta dengan ketentuan yang sudah ada.

Babak pertama sudah tidak perlu dibahas lagi, karena sampai sekarang, dengan kekuatan yang sangat besar dan sebagian ada yang kucing-kucingan, banyak toko yang menjual produk peranti Microsoft secara terbuka di mal-mal dan bahkan di pinggir jalan.

Di babak kedua, Microsoft mengebrak Indonesia dengan menyambangi pengusaha komputer di beberapa kota besar, setelah sebelumnya mengirim "surat peringatan" yang isi sebetulnya adalah surat ancaman. Ancaman ratusan juta akhirnya bisa berakhir dengan damai. Yang beruntung dalam kasus ini, sudah tentu bukan BSA maupun pengusahanya.

Pada babak ketiga, *third party* atau orang ketiga yang bergerak mewakili Microsoft adalah polisi yang sudah dibekali keahlian yang sangat tinggi. Polisi mengerti rincian tentang EULA (*END-USER LICENSE AGREEMENT*) yang bahkan tidak diketahui oleh pemakai komputer yang sudah lama malang melintang menggunakan Microsoft Windows.

EULA di Amerika harus dibaca dengan saksama dan harus ditaati. Salah satu klausulnya adalah persyaratan dari Microsoft untuk tidak boleh menyewakan program-program Microsoft ke orang yang bukan pembeli produknya.

Yang paling terkena dampak dari EULA ini adalah warnet (warung Internet) yang hidupnya kembang kempis karena persaingan yang tidak sehat di dalamnya, di samping jenis usahanya yang sarat modal dan teknologi tinggi. Memang, akhirnya babak ketiga dari cerita Microsoft ini sudah dapat dipecahkan, yaitu dengan diberikannya kelonggaran untuk warnet dengan catatan harus mendapatkan surat atau ijin dari Microsoft untuk menyewakan komputer yang berisi program dari Microsoft.

Sampai ujung manapun, pembajakan peranti lunak merupakan hal yang salah dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tetapi dengan

kondisi Indonesia yang serba minim, kita harus mencari solusi yang terbaik agar putra-putri bangsa Indonesia dapat ikut berperan dalam kiprah kemajuan teknologi informasi dunia.


Tingkat kemajuan bangsa didasarkan pada pendidikannya, dan pendidikan selalu berkaitan dengan teknologi komputer. Komputer berpangkal pada biaya dan daya beli, sehingga dalam satu populasi masyarakat kota tertentu, hanya 1 sampai 2 persen saja yang mampu memiliki komputer dan dapat mengikuti perkembangan teknologi. Warnet merupakan solusi "rakyat miskin" menerapkan teknologi informasi, karena dengan adanya warnet, seluruh lapisan masyarakat dapat "mencicipi" yang namanya teknologi informasi dalam skala yang paling murah, dihitung dengan rupiah per jam.

Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa bisnis warnet merupakan bisnis para oportunitis juga, yang dengan seenaknya membangun warnet untuk semata-mata mencari keuntungan, tanpa memahami

dasar-dasar keberadaan warnet dalam mempercepat permintaan bangsa Indonesia. Dan kelompok ini yang merusak citra warnet bukan saja di dalam negeri, tapi sampai keluar negeri, misalnya dalam kasus *card-*

ing atau penyalahgunaan kartu kredit untuk menguntungkan diri sendiri.

Dari semua kejadian ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa pendidikan merupakan kunci penyelesaian dari masalah di atas. Kalau mereka punya pendidikan yang lumayan, mereka tidak akan dengan seenaknya mencari pekerjaan yang tidak halal. Mereka bisa mencari solusi lain dari pemakaian program-program yang berbayar, misalnya menggunakan program *open source* sehingga terhindar dari uber-uberan BSA dan kepolisian.

Kalau bicara pendidikan, sepertinya kita harus menunggu satu generasi untuk membuat perubahan dan sementara semua sudah berjalan dengan tidak seperti yang diharapkan. Kemandegan masalah ini yang akhirnya sangat menbingungkan dan tidak ada penyelesaiannya. Pihak Microsoft selalu bersikeras untuk tidak memberikan perlakuan khusus dalam hal harga pada satu negara, karena khawatir dengan berbagai hal, misalnya penjualan kembali ke negara asalnya, dan protes yang akan disampaikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang membeli dalam jumlah banyak. 

...pembajakan peranti lunak merupakan hal yang salah dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.